Pertahanan Militer Negara Kepulauan dalam Modern Warfare



Laksma TNI Salim, S.E,.M.Phil,.M.Tr.Opsla
Kapusjianmar Seskoal

"Future warfare will be determined by various factors including; geostrategic competition, conflict domains, hybrid threats, weapons development technology, and the increasing role of non-state actors (NSAs)."

Pertahanan militer negara kepulauan memiliki makna yang komplek dan multidimensi, mengingat karakteristik geografis yang unik, dengan memiliki arti penting; Perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial, strategi pertahanan yang multi domain, penanganan ancaman tradisional, logistik dan infrastruktur strategis, perlindungan terhadap sumberdaya dan ekonomi, Asymetric dan ancaman Hibrida serta kerjasama regional maupun internasional. Membangun sistem pertahanan militer negara kepulauan sebagai turunan dari pertahanan nasional di era kontemporer akan menghadapi berbagai tantangan terhadap perkembangan teknologi, bentuk dan arah ancaman yang semakin tidak tampak, baik oleh indera penglihatan maupun alat deteksi yang canggih sekalipun. Saat ini ancaman tersebut akan memasuki era peperangan *Proxy, Asymetric* dan *Symetric, Cyber* maupun *Hybrid* pada *Network Centric Warfare (NCW)* dalam peperangan modern. Pertahanan militer negara kepulauan paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat faktor elemen fundamental sebagai berikut:

Pertama, teori Halford Mackinder *"Heartland"* dan Nicholas Spykman *"Rimland"* menunjukkan bahwa kedua pemikir tersebut telah menyatakan geografi memiliki peran penting dalam menentukan strategi pertahanan suatu negara, termasuk negara kepulauan. Sebuat saja Inggris, Jepang, Madagaskar, Philipina dan beberapa negara kepulauan lainnya di dunia, dan sangat jelas bahwa secara *de yure* maupun *de facto* "bentuk geografis negara Indonesia bukan negara kontinental akan tetapi negara maritim yang berbentuk kepulauan,". Inilah yang harus disadari bahwasannya *geographical destiny* yang dihuni oleh 280 juta penduduk Indonesia adalah negara kepulauan.

Kedua, David Galula dalam bukunya *"Counterinsurgency Warfare: Teori and Practice,"* galula menjelaskan bahwa keberhasilan dalam perang melawan pemberontakan sangat tergantung dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan

sumber daya nasional. Semakin tinggi pendidikan dan sumber daya manusia yang berfikiran ekstrovet merupakan ciri dari masyarakat pesisir negara kepulauan dalam menata arsitektur pertahanan, sehingga membangun daya tahan dan respon terhadap ancaman dapat diandalkan. Oleh karena itu peperangan hibrida akan terjadi ketika konflik terbuka maupun invasi terlalu mahal untuk dilakukan.

Ketiga, dalam konsep *Cyber Warfare* ketajaman analisis terhadap kemungkinan ancaman dengan cara yang biasa tidak kita pikirkan terutama pada infrastruktur informasi pada masyarakat informasi negara kepulauan sangat dibutuhkan. Era modern dimana revolusi industri telah merubah masyarakat industri menjadi era informasi atau digitalisasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan segala asset maupun kerentanan dan ancaman yang ditimbulkan di era komputerisasi, metode hibrida digunakan untuk mengaburkan batas antara perang dan perdamaian, dan mencoba menabur keraguan di benak populasi sebagai sasaran terutama penghuni negara kepulauan.[2]

Keempat, sebuah teori yang menyatakan bahwa adanya korelasi antara *cyber* dan negara kepulauan umumnya dikaitkan dengan penelitian tentang *cyber security* dan geopolitik. Salah satu tokoh yang sering dibahas dalam konteks ini adalah *Joseph Nye* yang mengembangkan konsep *"Soft Power"* dan menjelaskan bagaimana negara-negara termasuk negara kepulauan, dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengaruh mereka. Urgensi masyarakat negara kepulauan dalam menghadapi peperangan modern adalah dengan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, dalam istilah militer sering disebut dengan *C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligent, Surveillance and Reconnaissance).* Kerentanan utama pada *C5ISR* terdapat tiga lapisan utama khususnya pada *Cyber threats* yaitu: *sensor layer*, *info command and control layer* dan kondisi *integrated Combat System* yang berada di lapangan.

Selama ini, periode waktu setelah kemerdekaan RI orientasi sektor pertahanan Indonesia lebih condong berperspektif ke kontinental, sekalipun wilayah laut kita jauh lebih luas. Dengan menggunakan paradigma darat, maka doktrin yang digunakan untuk pertahanan adalah Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Doktrin ini mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan doktrin sishanta inilah diperlukan aparat teritorial untuk mempersiapkan wilayah-wilayah Indonesia, untuk berperang dengan kekuatan gabungan rakyat dan tentara pada saat musuh sudah berada di wilayah NKRI. Pertanyaannya kemudian adalah apakah doktrin ini masih relevan dengan pertahanan negara kepulauan dengan jangkauan musuh kita sebelum masuk wilayah NKRI serta dihadapkan anatomi dan bentuk *modern warfare* dengan teknologi yang semakin canggih? Selain melihat kompetisi *geostrategic* antara lain *geopolitic, geoeconomy*, perdagangan internasional dan investasi, *financial* maupun *monetary system* juga domain konflik dimasa depan meliputi *Cyber Space, Aerospece, Artic, Cyber security, Ocean* dan daratan (Asia Pacific, Mid-East, Europe, US, Russia, China).

Sebagai negara Kepualauan Indonesia seharusnya memiliki perspektif kelautan dalam pelaksanaan pertahanan nasional. Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat *Continental Based Defense*, dengan berfokus pada satu *fighting instrument* menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin *Archipelagic Based Defense*. Doktrin ini menekankan pada Angkatan Laut yang kuat dengan dukungan Angkatan Udara yang kuat pula. *Archiperlagic Based Defense* sebagai

kekuatan inti *Maritime Power* harus mengkolaborasikan kekuatan Laut, Udara dan Darat sebagai *element fighting instruments* karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat yang tidak mungkin dilakukan melalui daratan.

Strategi dan Struktur Pertahanan Militer



Gambar.1 *Military Archipelagic Defence Generated by AI*

Ancaman non-konvensional yang muncul dewasa ini membuat spektrum pertahanan sebuah negara tidak bisa lagi parsial, apalagi ancaman yang muncul dari sektor kelautan pun semakin beragam. Membangun pertahanan militer di negara kepulauan *(archipelagic state)* memerlukan pendekatan yang unik karena karakteristik geografisnya yang terdiri dari banyak pulau hingga ribuan, perairan luas, dan tantangan penyebaran logistik. Berikut adalah strategi dan prinsip utama yang dapat diterapkan dalam pertahanan negara kepulauan:

1. Memahami tantangan geografis dan strategis, luas wilayah dan dispersi pulau yang merupakan Negara kepulauan dengan memiliki wilayah yang cukup luas dan posisi pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau. Maka tantangan utama yaitu kerentanan di laut seperti; ancaman aktivitas *illegal at sea*, atau pelanggaran kedaulatan sering terjadi di perairan. Dalam konteks *asymetric warfare*, strategi pertahanan asymetris merupakan bagian dari pertahanan negara kepulauan dengan melindungi infrastruktur kritis pada pertahanan Siber. Bangsa ini mengalami keterbatasan infrastruktur pangkalan militer angkatan laut, dimana sejak penjajahan belanda kita belum memiliki pangkalan TNI AL yang layak seperti pangkalan TNI AL Surabaya. Posisi pulau satu dengan lainnya beragam ada yang jauh dan berdekatan maka konsep pertahanan terintegrasi negara kepulaun akan lebih menguntungkan dan memudahkan dibandingkan konsep pertahanan berbasis pulau besar, dengan penguatan sistem komunikasi dan transportasi.
2. Strategi Pertahanan militer negara kepulauan merupakan strategi pertahanan yang terintegrasi, yang terdiri dari; kekuatan Laut *(Naval Power atau Dominance)* pada susunan tempur Angkatan Laut modern meliputi kapal perang cepat *(fast attack craft)* dengan kemampuan persenjataan *Missile to air* dan *missile to surface*, kapal selam, kapal patroli, dan sistem senjata anti-kapal atau anti-udara. Pada pertahanan berlapis, lapisan pertama meliputi Patroli kapal cepat dan pesawat *Unmanned Aerial Vessel (UAV)* maupun kapal selam untuk pengawasan pesisir serta kapal yang memiliki kemampuan peranjauan. Lapisan kedua meliputi kapal perang berukuran sedang untuk mengamankan jalur laut strategis yang memiliki persenjataan dan kemampuan *Anti Air Warfare*, *Anti Surface Warfare* mapun *Anti Sub Surface Warfare*. Lapisan ketiga meliputi kapal besar *(*kelas *frigate* atau kelas *destroyer)* dan kapal selam untuk proyeksi kekuatan di ZEE yang memiliki kemampuan *Anti Electronic*

Warfare dengan kemampuan *jamming* maupun *counter jamming*. Diperlukan juga kekuatan yang mampu menjaga keamanan maritim maupun sebagai *decoy* atau pengelabuan dengan diproyeksikan pada posisi *over the horizon (OTH).* Metode ini telah digunakan Cina dalam mendeploy kekuatan pengelabuan armada kapal ikan yang terdiri dari *Militia* sebagai Nelayan, *Coast Guard* sebagai *long range intelligent* dan dijaga oleh PLA Navy.

3. Strategi pembangunan kekuatan udara dan pengawasan pada pertahanan militer negara kepulauan meliputi: Pesawat Patroli Maritim seperti Pesawat seperti Boeing P-8 Poseidon atau CN-235 MPA untuk pengawasan laut. Drone dan Satelit, seperti penggunaan *UAV* (seperti *Medium Altitude Long Endurance (MALE)* dan *High Altitude Long Endurance* (MALE) drones serta satelit penginderaan untuk memantau wilayah terpencil. Sistem Radar Terpadu yang meliputi jaringan radar pesisir dan *OTH* untuk deteksi dini ancaman.
4. Strategi respons dalam pasukan cepat dan mobilitas tinggi dalam hal ini pasukan khusus Intai amphibi yang merupakan pasukan komando yang bisa bergerak cepat antar pulau. Begitu pula transportasi udara dan laut seperti Helikopter, Kapal Angkut Cepat (LCU) atau kapal *landing platform dock (LPD)* untuk logistik dan pergerakan pasukan.
5. Strategi pertahanan siber dalam pertahanan negara kepulauan dengan membangun kemampuan siber untuk melindungi infrastruktur kritis seperti pelabuhan, komunikasi dan satelit. Meningkatkan kemampuan sistem peperangan elektronik atau *electronic warfare* untuk mengganggu komunikasi musuh. Peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi khususnya dalam *Artificial Intelligent (AI)* yaitu menganalisis data *real time* dari sensor laut atau udara untuk memprediksi arah datangnya ancaman. Selain itu penggunaan *underwater sensor networks* untuk mendeteksi kapal selam atau penyusup di perairan teritorial serta pemanfaatan *Swarm Drones,* drone otonom untuk misi intelegent maupun serangan terkoordinasi.
6. Strategi dalam pembangunan infrastruktur pertahanan negara kepulauan, meliputi pembangunan pangkalan militer strategis di pulau-pulau terdepan dapat meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mencegah ancaman dari luar, pengembangan ekonomi, pengembangan sumber daya maupun kerjasama internasional. Pembangunan *Dual-Use Infrastructure* yaitu pembangunan bandara militer dan bandara sipil yang bisa digunakan untuk kepentingan militer saat darurat. Hal ini diperlukan karena penggelaran *maritime force* membutuhkan *forward defence* dengan mengaca kepada operasi pembebasan MV Sinar Kudus. Tak kalah penting adalah pembangunan jaring komunikasi yang aman dengan menggunakan sistem satelit atau serat optik bawah laut untuk menghubungkan komando pusat dengan pos terdepan.
7. Pemberdayaan wilayah pertahanan negara kepulauan sebagai program kewaspadaan nasional yang melibatkan masyarakat pesisir sebagai "mata dan telinga" untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan juga melaksanakan bela negara untuk membentuk cadangan militer atau milisi sipil di wilayah terpencil. Selain itu membangun konsep *Maritime Domain Awareness (MDA)* dengan berbagi informasi atau *information sharing* intelijen maritim dengan negara tetangga untuk memantau aktivitas mencurigakan.

Pertahanan militer negara kepulauan harus menggabungkan kekuatan maritim, teknologi pengawasan, memiliki kemampuan pasukan dengan mobilitas tinggi dan respons yang

cepat, dan terlibat aktif dalam kerja sama regional, khususnya dalam *capacity building* dan *information sharing*. Implementasi dari strategi pertahanan negara kepulauan akan dapat melindungi kedaulatan dan sumber daya laut secara signifikan pada negara kepulauan. Bagi bangsa Indonesia keberadaan pertahanan militer negara kepulauan yang merupakan keturunan dari pertahanan negara kepulauan merupakan suatu hal yang tidak bisa dikompromikan lagi mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi dan ancaman semakin komplek di era modern. Pertahanan militer negara kepulauan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas, keamanan dan kesejahteraan bangsa indonesia dari sabang sampai merauke, dari miangas hingga ke rote. Pendekatan "multi-domain" yang meliputi laut, udara, siber, ruang angkasa dan integrasi dengan aspek non-militer seperti diplomasi, ekonomi, hukum sangat penting untuk menciptakan deterensi yang lebih efektif.

Saatnya bangsa ini sadar akan *geographical defence awareness,…Where there is a will, there is a way.* ***

Reference:

1. https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7626/profil-lima-negara-kepulauan-partisipan-ais-forum?lang=1
2. FADM Salim M.Phil., Basic knowledge of Cyber Security DIY, 2022.
3. https://ccdcoe.org/insider-threat.html

